PENGERTIAN DAN EKSISTENSI ANTROPOLOGI HUKUM

Retno Aprilla Hardi

Email : retnoaprilla@icloud.com

No BP : 2110003600339

Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. “Antrophos” berarti Manusia dan “logos” berarti Ilmu Pengetahuan. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Ilmu antropologi hukum mempelajari peran, status atau kedudukan, nilai, norma dan kebudayaan. Dalam antropologi hukum tidak dapat membatasi diri pada peraturan - peraturan hukum dan bentuk – bentuk sanksinya, yang perlu diketahui jelas adalah proses pembentukan hukumnya.

Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budaya khusus dibidang hukum. Kebudayaan hukum adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa yang mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah social yang ada didalam masyarakat sendiri. Hukum dipahami sebagai milik sebuah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Suatu masyarakat dianggap hanya memiliki satu sistem hukum yang mengendalikan perilaku anggotanya. Hukum diartikan sebagai disiplin (system ajaran tentang kenyataan) dan ilmu pengetahuan (ilmu hukum).

Dapat disimpulkan bahwa pentingnya mempelajari ilmu antropologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana norma – norma hukum itu diimplementasikan dalam kehidupan social masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna social dan pentingnya Hukum dengan menelaah, konteks social pembuatan hukum, mempertahankan institusi social, dan membangun perilaku social. Kajian antropologi hukum meluas, membahas keterkaitan antara konflik social dengan kesenjangan ekonomi dan batasan hukum dalam melakukan rekayasa social. Antropologi hukum mengkaji tentang hubungan antara politik dan hukum yang berubah dalam konteks pasca perang dingin.

Antropologi hukum adalah salah satu ilmu yang saat ini masih dalam tahap pertumbuhan. Yang mempelajari tentang kekhasan bentuk hukum dalam periode sejarah yang berbeda dan dalam keadaan yang sama sekali berbeda.

Antropologi berasal dari bahasa Yunani, “anthropos” yang artinya Manusia dan “logos” yang artinya Ilmu. Antropologi sendiri adalah suatu studi yang mempelajari tentang manusia dari aspek budaya perilaku nilai keanekaragaman dan hal-hal yang mendukung, antropologi terdiri atas :

1. Antropologi Ekonomi
2. Antropologi Politik
3. Antropologi Pendidikan
4. Antropologi Hukum

Antropologi hukum sendiri adalah ilmu hukum yang membahas tentang manusia dengan kebudayaan khususnya di bidang hukum atau ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah social yang bersifat hukum. Antropologi sendiri memiliki sifat keilmuan, yaitu:

- a. Sifat keilmuan antropologi tidak hukum tidak membatasi pandangan kebudayaan tertentu

- b. Antropologi hukum mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, diman bagiannya saling bertautan
- c. Antropologi hukum modern tidak memusatkan perhatian, hanya pada kekuatan social dan superorganik
- d. Antropolgi hukum memandang masyarakat yang dinamis.

Antropologi hukum termasuk antropologi hukum yang empire.

Ruang Lingkup Antropolgi Hukum

Ruang lingkup antroplogi hukum adalah suatu spesialisasi dari antropologi budaya, antropologi social, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek hukum.

Laura Nader dalam bukunya “ The Anthropological Study Law” pada tahun 1965, mengemukakan ruang lingkup antropologi hukum :

- (1) Apakah dalam setiap masyarakatv terdapat hukum? Dan bagaimana karakteristik yang Universal?
- (2) Bagaimana hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan organisasi social?
- (3) Apakah diadakan topologi hukum? Sedangkan variasi karakteristik hukum sangat terbatas.
- (4) Apakah tiplogi hukum berguna meneklaah hubungan hukum dengan aspek budaya dan organisasi social?
- (5) Mengapa hukum itu berubah, serta bagaimana cara mendiskusikan system – system Hukum?

Cara mempelajari antroplogi hukum ada 4 metode, yaitu :

- 1. Metode historis
- 2. Metode normative eksploratif
- 3. Metode deskriptif perilaku

4. Metode studi kasus

Tugas Antropologi hukum adalah memberikan pemahaman tentang hukum – hukum “Non-state law” yaitu memberikan kajian melalui tela’ah mendalam yang kelak menjadi system.

Antropologi hukum dapat dilihat dalam persidangan atau penyelesaian sengketa yang berlangsung dipengadilan. Hakim yang memiliki pengetahuan akan menggali sumber – sumber hukum yang hidup ditengah masyarakat dan menyelesaikan penyelesaian.

Manfaat Antropologi Hukum Secara Teoritis

1. Mengetahui pengertian hukum
2. Dapat mengetahui bagaimana masyarakat bias mempertahankan nilai – nilai dasar yang dimiliki, bagaimana masyarakat bias melakukan perubahan terhadap nilai dasar.
3. Dapat mengetahui perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat atas suatu yang seharusnya dilakukan
4. Dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang masih kuat / fanatic mempertahankan nilai – nilai budaya.
5. Dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat yang memiliki norma – norma perilaku yang sudah tinggi

Sifat antropologi hukum sendiri ada 2, yaitu

- a. Interdisiplin, yaitu saling membantu dan mendukung dalam menyelesaikan sesuatu
- b. Interdependensi , yaitu saling memiliki keterkaitan atau ketergantungan antara satu dengan yang lain.

Pendekatan Antropolgi Hukum

1. Pendekatan Holistik, yaitu secara menyeluruh mengkaitkan antara hubungan fenomena hukum dengan aspek kebudayaan
2. Pendekatan Legal Centralise Map Roh, yaitu pendekatan secara terpusat
3. Pendekatan Komperatif method, yaitu dengan melakukan studi perbandingan antara system – system hukum dalam masyarakat, yang berbeda diberbagai dunia.

Sejarah Antropologi Hukum

Ada tujuh periode penting dalam perkembangan antropologi hukum. **Periode yang pertama** terjadi pada tahun 1860-an, ketika Sir Henry Maine yang sedang bertugas di India menerbitkan “ Ancient Law” yang merangkum berbagai tradisi hukum dan mengembangkan teori bahwa setiap masyarakat yang berkembang akan mengalami perubahan dari versi Primitifnya menuju masyarakat Victoria. Pandangan Maine dapat divap rasis dalam konteeks modern karena memuliakan peradaban Eropa.

Periode Kedua terjadi pada tahun 1920-an, ketika **Bronislaw Malinowski** mengkritik teori **Maine** dan mengembangkan pendekatan etnografis dalam mengkaji hukum. **E Adamson Hoebel** bersama dengan akademisi hukum **Karl Llewelyn** menerbitkan **The Cheyenne Way** pada tahun 1941 yang menggunakan pendekatan studi kasus dalam mengkaji hukum asing. Pendekatan **Hoebel** ini merupakan kembalinya teori evolusi yang dikembangkan oleh Maine.

Di pertengahan abad ke-20, antropolog-antropolog memperdebatkan penggunaan pendekatan pengkategorian hukum Anglo-Amerika dalam mengkaji masyarakat-masyarakat non-Barat. Dua tokoh utama dalam perdebatan ini ialah **Max Gluckman** dan **Paul Bohannan**. Bohannan meyakini bahwa pengkategorian berdasarkan hukum Anglo-Amerika

membatasi pemahaman dan keterwakilan budaya lain dan lebih menyukai penggunaan istilah setempat yang belum tentu konsepnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tetapi dapat dijelaskan. Sementara itu **Gluckman** menilai pendekatan Bohannon tersebut terlalu berhati-hati dan justru menjadi penghalang dalam menghasilkan analisis perbandingan.

Pada tahun 1970-an, kajian antropologi hukum mengalami peralihan dari aturan hukum keproses hukum. Gagasan pengkajian proses hukum ini melihat pluralisme hukum, rezim alternatif, dan struktur hukum yang ada dalam masyarakat mana pun. Pada tahun 1980-an, wacana dan kritik pascamodernis muncul dan mempertanyakan pengkategorian tradisional yang dilakukan oleh para antropolog hukum. Pendekatan kasus yang dikembangkan oleh Hoebel dianggap tidak melihat kepatuhan pada hukum di masyarakat dan penekanan pada nilai-nilai hukum Anglo-Amerika.

Pada tahun 1990-an, pengkajian antropologi hukum terus berkembang dengan banyaknya akademisi yang menginginkan kajian dari perspektif-perspektif berbeda seperti melalui pendekatan linguistik, pendekatan naratif, kajian interdisipliner, aspek-aspek transnasional, dan keterkaitan antara hukum dengan budaya suatu masyarakat.

C. PENUTUP

Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.

Antropologi Hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai antropologi hukum. Antropologi hukum telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu hukum. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah dimana pun kita, kita tidak akan pernah jauh dari hukum selama kita berada di Negara hukum.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201.
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102>
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum

Indonesia, *Dialogica Jurnalica*, Volume 11, Nomor 1, 2019,
<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

Laurensius Arliman S, *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, *UIR Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2018,
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)

Laurensius Arliman S, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, *Doctrinal*, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, *Journal of Innovation, Creativity and Change* Volume 15, Nomor 6, 2021.

Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, *Jurnal Yuridis*, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>
(<http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180%20/h>).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*, Volume 2, Nomor 3, 2020.